

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pengendalian inflasi adalah untuk menstabilkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ . Inflasi, selain menggerus daya beli, juga akan menyulitkan pelaku usaha di dalam mengkalkulasi biaya input produksi dan secara makro dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi nasional terbentuk dari inflasi daerah, sehingga penelitian tentang inflasi di tingkat daerah sangat diperlukan. Penghitungan inflasi wilayah Ciayumajakuning dilakukan di Kota Cirebon, data tingkat inflasi Kota Cirebon pada tahun 2018 - 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Tingkat Inflasi Tahun 2018 - 2023 di Kota Cirebon

<i>Tahun</i>	<i>Nasional IHK (yoy)</i>	<i>Prov. Jawa Barat IHK (yoy)</i>	<i>Kota Cirebon IHK (yoy)</i>
2018	3,13	3,54	2,80
2019	2,72	3,21	2,00
2020	1,68	2,18	1,17
2021	1,87	1,69	1,81
2022	5,51	6,0	4,86
2023	2,28	4,32	4,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

¹ Bank Indonesia (2020)

Berdasarkan laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik), inflasi IHK pada tahun 2018-2021 relatif stabil dan rendah, baik inflasi di tingkat nasional maupun daerah. Namun, tingkat inflasi nasional dan daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tergolong tinggi yakni mencapai 5,51% (yoy), dimana angka inflasi ini sudah melebihi target maksimal 4%. Inflasi IHK di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 6% (yoy) dan inflasi IHK di Kota Cirebon pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 4,86% (yoy) dan 4,57% (yoy), dimana inflasi Kota Cirebon menjadi kota inflasi tertinggi se-nasional.

Faktor penyebab dari tingginya tingkat inflasi nasional dan daerah disebabkan oleh 2 (dua) faktor. Faktor secara teori dan secara praktis. Secara teori penyebab tingginya inflasi yaitu pertama *demand pull inflation*, dimana inflasi terjadi karena jumlah permintaan barang/jasa mengalami peningkatan. Kedua, *cost push inflation* yakni inflasi terjadi karena kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang/jasa. Ketiga, *inflation expectation*, inflasi tinggi juga bisa disebabkan karena tingginya ekspektasi para pelaku ekonomi.²

Faktor penyebab tingginya inflasi nasional juga karena dinamika harga energi dunia yang diiringi penyesuaian kebijakan harga energi (*administered price*) dan kenaikan harga *volatile foods* telah menjadi dua penyumbang utama tingginya angka inflasi di tahun 2022. Faktor penyebab tingginya inflasi daerah khususnya di Kota Cirebon pada tahun 2022 dan 2023 yaitu karena naiknya tarif air minum PDAM sebanyak 70% secara sekaligus, dimana kenaikannya terjadi pada konsumen yang disurvei oleh BPS Kota Cirebon.³

Berdasarkan data BPS bulan Februari tahun 2024, salah satu kontribusi terbesar terhadap inflasi di Indonesia berasal dari komoditas pangan (*volatile foods*). Sumbangan *volatile food* terhadap inflasi sendiri mencapai 8,47%. Komoditi yang dominan memberikan sumbangan inflasi terbesar adalah beras (0,7686%), cabai merah (0,1792%), daging ayam ras (0,1753%), bawang

² Suparmono (2018)

³ Hasil Interview dengan Fungsi Data Ekonomi dan Statistik Bank Indonesia Cirebon (2023)

merah (0,1136%), dan bawang putih (0,0663%).⁴ Sementara itu, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.⁵ Dampak dari tingginya harga komoditas pangan berdampak pada stabilitas makro ekonomi (pengendalian inflasi) yang kemudian berdampak pula pada hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat, baik pada level produsen (petani) maupun pada level konsumen (rakyat).

Perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi. Data historis menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh *supply shocks* dan kebijakan *administered price*. Mengingat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran, maka koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus kuat. Hal tersebut dilandasi kesadaran bahwa inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh fenomena moneter, melainkan juga fenomena fiskal dan sektor riil. Koordinasi tidak hanya dilaksanakan di level pemerintah pusat, namun juga harus dilaksanakan di level Daerah karena lebih dari 70% inflasi di Indonesia bersumber dari Inflasi di daerah.⁶

Pemerintah sebagai pengendali suatu negara memiliki peran dan fungsi yang harus dilaksanakan secara merata dan menyeluruh terhadap masyarakat untuk memenuhi atau memberikan suatu kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat dan dapat mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita negara. Salah satu perannya yaitu stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah,

⁴ <https://cirebonkota.bps.go.id/statictable/2024/03/05/207/komoditas-penyumbang-inflasi-deflasi-year-on-year-y-on-y-kota-cirebon-februari-2024.html>

⁵ Tim Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Kegiatan Bank Indonesia Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Klaster Komoditi Unggulan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 16.

⁶ Tim Pengendali Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, *Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Buku Panduan*, h. 7.

maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut.⁷

Perkembangan inflasi IHK yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Menurut data dari Bank Indonesia (2023) menyatakan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi, sehingga inflasi inti tetap akan terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$. Menyadari pentingnya peran dan koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008.

Sebagaimana tujuan pembentukan TPID di seluruh Kota/Kabupaten, maka fungsi pengendalian inflasi daerah menjadi fokus bersama sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi lain yang tergabung sebagai anggotanya. Pengendalian inflasi daerah secara umum mencakup 4K strategi kunci yaitu Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut dielaborasi oleh TPID setiap Kota/Kabupaten menjadi beragam inovasi program yang mampu mendorong kestabilan angka inflasi di daerah daerah.⁸

Pada tahun 2014, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Ciayumajakuning yang terdiri dari lima daerah yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan *roadmap* program pengendalian inflasi di Jawa Barat merupakan turunan dari

⁷ Mohamad Khusnaini, *Ekonomi Publik*, (Malang: UB Press, 2019), hlm 17.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi

strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) yang disampaikan oleh Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional TPID.⁹ Melalui *roadmap* tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyumbang inflasi yang paling dominan di Provinsi Jawa Barat termasuk daerah Kota Cirebon adalah *volatile food*.

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai analisis inflasi, maka penulis memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Novita dan kolega tahun 2021 dengan judul penelitian Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung pada kelompok bahan pangan yang menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi yang tinggi di tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengendalikan inflasi kelompok bahan pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Satgas pangan melaksanakan berbagai program kegiatan antara lain pemantauan, pengawasan, pembinaan, sidak dan monitoring harga pasar, serta pasar murah. Dari beberapa program tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan harga pasar, meminimalisir peredaran produk tidak standard, dan ketersediaan bahan pangan. Program kegiatan tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari grafik *trandline* yang menunjukkan adanya penurunan pada kelompok bahan pangan, meskipun belum secara signifikan karena adanya kendala pada anggaran. Namun hal tersebut juga memberikan dampak yang baik disamping penurunan inflasi tetapi juga pada peningkatan kerja sama dengan mitra baru yang diharapkan dapat mempermudah dalam Upaya pengendalian inflasi di masa depan.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Nurkhasanatur dan kolega yang ditulis pada tahun 2023 dengan judul Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh dalam Pengendalian Inflasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan strategi yang dilakukan oleh

⁹ Wahid Abdul, dkk, 2021 “Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir : Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon”, Bank Indonesia Institut, Bank Indonesia.

TPID Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan Peran TPID Kota Banda Aceh menjadi 3 (tiga) kategori yaitu peran *aktif* yang dimana TPID melakukan optimalisasi pasar murah / operasi pasar, melakukan penguatan dan pengawasan cadangan pangan, melakukan integrasi update data harga pangan di *habapangan.go.id*, dan peningkatan kehandalan TPID melalui Program Pembinaan (*Capacity Building*). Peran *partisipatif*, melakukan kerjasama dengan daerah surplus pangan dan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional. Peran *pasif*, peran yang dilakukan oleh Bappeda sebagai anggota TPID akan tetapi tidak menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan fungsinya kepada anggota pengurus lainnya. Strategi yang dilakukan oleh TPID Kota Banda Aceh yaitu strategi 4K berupa keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Peranan TPID telah sesuai dengan pedoman pengendalian secara aktif, partisipatif, pasif. Diharapkan adanya upaya dari semua anggota TPID agar kinerjanya dalam pengendalian inflasi di kota Banda Aceh menjadi lebih maksimal.

Berikutnya penelitian yang ditulis oleh Surya Dharma dengan judul Analisis Peranan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap Pengendalian Inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa TPID mempunyai dampak dalam pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara. Komoditas kelompok yang tingkat persistensi inflasinya paling tinggi adalah kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan kelompok bahan bakar dan komoditas bahan makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alaminya 3 hari menjadi 16 hari.

Penelitian berikutnya yaitu ditulis oleh Muh. Izwar Rafiq dan kolega dengan judul Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi, insentif daerah dan

Kerjasama tim terhadap kinerja anggota TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene 2) insentif daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene 3) kerjasama tim berpengaruh positif terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene 4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi, insentif daerah dan kerjasama tim secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene 5) Variabel insentif daerah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu seperti di atas, maka penulis ingin melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di Kota Cirebon pada tahun 2022 dan 2023 serta menganalisis upaya dan strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon dalam pengendalian inflasi di Kota Cirebon. Penelitian ini akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan judul: **ANALISIS DAMPAK PENGENDALIAN INFLASI TERHADAP TINGKAT INFLASI DAERAH KOTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran perekonomian daerah Ciayumajakuning dalam 5 tahun terakhir?
2. Bagaimana strategi TPID dalam berupaya mengendalikan inflasi?
3. Bagaimana dampak pengendalian inflasi terhadap perekonomian daerah Ciayumajakuning?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan gambaran perekonomian daerah Ciayumajakuning dalam 5 tahun terakhir.
2. Untuk menganalisis strategi TPID dalam berupaya mengendalikan inflasi.
3. Untuk menganalisis dampak pengendalian inflasi terhadap perekonomian daerah Ciayumajakuning.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca di bidang keilmuan ekonomi khususnya tentang inflasi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi dalam hal kepentingan ilmiah.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada Instansi/Organisasi yang terkait guna meningkatkan Tim Pengendalian Inflasi di daerah lain.

E. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis perlu dijadikan acuan tersendiri. Pada hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah hal terkait dengan masalah manajemen ataupun masalah inflasi dan tim pengendalian inflasi.

Berdasarkan permasalahan tentang penelitian mengenai analisis inflasi, maka penulis memiliki acuan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Santoso (2017) tentang “Analisis Inflasi di Indonesia“, merupakan penelitian tentang inflasi dengan menganalisis model vitaliano, dimana variabel dalam model yang digunakan untuk menjelaskan variabel inflasi adalah jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang dan pendapatan nasional berpengaruh terhadap inflasi nasional sedangkan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap inflasi nasional.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ida Marina (2021) tentang “Pendampingan Program Pengendalian Inflasi Daerah pada Kluster Cabai Merah di Majalengka“, merupakan penelitian tentang salah satu Upaya pengendalian inflasi yakni program pendampingan dan pengembangan kluster cabai merah dalam rangka mendukung program TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan kerangka 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hasil dari penelitian tersebut berupa penawaran berbagai pengolahan yang dapat dilakukan beserta kemasan yang lebih menarik untuk produk-produk hasil olahan cabai. Tim PKM memberikan penjelasan terkait promosi produk yang dapat dilakukan mulai dari promosi *door to door* hingga promosi yang melibatkan pengembangan komunikasi digital.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agung Hartadi (2019) tentang “Musim Inflasi di Jawa Barat dan Penyebabnya“, merupakan penelitian

yang membahas tentang waktu terjadi inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat dan komoditas-komoditas yang menyebabkannya. Penelitian ini juga menggambarkan tingkat inflasi *demand pull inflation*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa musim inflasi terjadi pada peringatan hari-hari besar diantaranya saat menjelang awal tahu, bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri dan akhir tahun yang bersamaan dengan hari raya Natal. Inflasi yang terjadi pada bulan-bulan tersebut terjadi dikarenakan adanya dorongan permintaan terhadap bahan makanan, transportasi dan kebutuhan penunjang perumahan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis juga akan menganalisis jenis inflasi dari segi *demand pull inflation* dan *cost full inflation*.

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Meda Fitria (2018) tentang “Manajemen Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengendalikan Inflasi di Kota Palangka Raya”, merupakan penelitian untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini dibentuk dalam suatu tim disebut TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dalam mengendalikan inflasi daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kerja TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan pedoman pengendalian inflasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, bahwa manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kalimantan Tengah cukup efektif dengan kontribusi yang berhasil mereka capai sebagaimana tujuan dari TPID.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penelitian ini dengan judul Analisis Dampak Pengendalian Inflasi terhadap Tingkat Inflasi Daerah Kota Cirebon, yakni ingin menyempurnakan beberapa penelitian yang sudah ada pada uraian di atas. Pada penelitian ini penulis ingin menganalisis beberapa faktor penyebab tingginya tingkat inflasi nasional dan daerah serta bentuk upaya atau strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Siyoto dan Sodik (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dan menggunakan analisis dalam melakukan penelitian. Selain itu penelitian deskriptif merupakan suatu keadaan yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi pada saat itu (Noor, 2012). Objek penelitian ini adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). Karena objek penelitian ini adalah Teknik Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon, maka wawancara pada penelitian ini melibatkan 2 (dua) pegawai Bank Indonesia Cirebon yaitu kepala seksi Kehumasan sebagai anggota TPID Kota Cirebon, analis junior Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan, dan melibatkan 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon Bagian Perekonomian, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, serta melibatkan 1 (satu) pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon bagian data inflasi. Teknik pengumpulan data dengan FGD ini dilakukan ketika ketua, wakil dan anggota TPID melaksanakan pertemuan setiap triwulanan pada *High Level Meeting* dalam pembahasan isu-isu strategis perekonomian di Ciayumajakuning.

Untuk memenuhi data seperti yang disinggung diatas maka diperlukan sumber data primer dan skunder. Data primer yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti pada penelitian ini. Proses pengumpulan data primer pada penelitian ini melibatkan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan FGD. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan referensi, seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah daerah, basis data dari website resmi BPS dan Bank Indonesia, serta sumber informasi online lainnya sebagai data pendukung.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian diterapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis Dampak Pengendalian Inflasi terhadap Tingkat Inflasi Daerah Ciayumajakuning”.

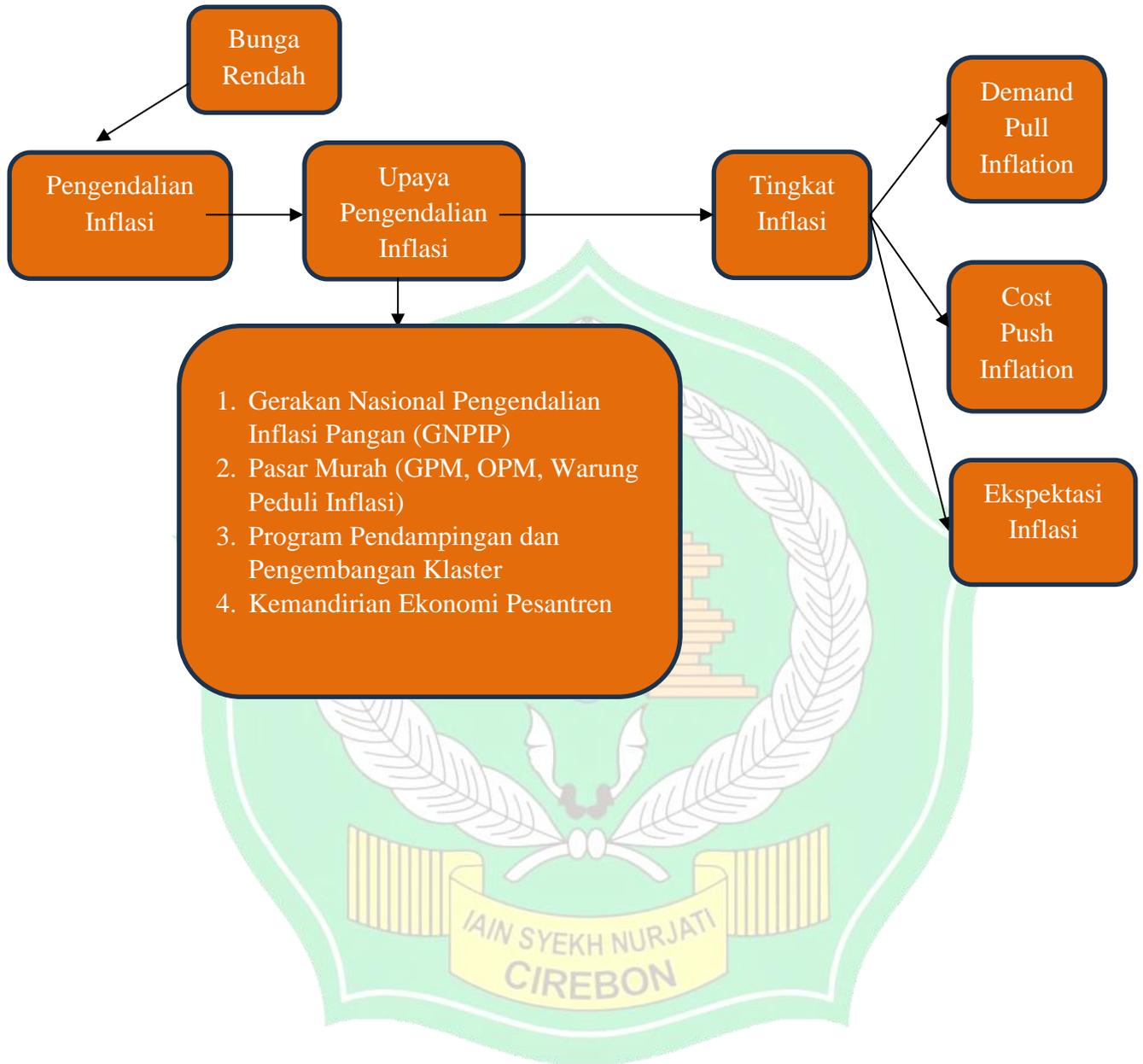
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (Bank Indonesia, 2023). Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengatur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi.

Upaya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun daerah. Bank Indonesia menyadari bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan dengan penggunaan kebijakan moneter semata, tetapi memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik pada tingkat nasional maupun daerah merupakan kunci untuk tercapainya inflasi yang rendah. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 0225. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level Daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.

Diagram 1.1
Kerangka Konseptual Analisis Dampak Pengendalian Inflasi



H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah, penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, yang terdiri dari teori tentang inflasi, pengendalian inflasi, tingkat inflasi, peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peran Bank Indonesia, UUD tentang inflasi, dan perpektif Islam terhadap inflasi.

Bab III DEMOGRAFI PEREKONOMIAN CIAYUMAJAKUNING DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, dimana pada bab 3 (tiga) ini berisi tentang Demografi dan Inflasi Ciayumajakuning, serta menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 yakni, bagaimana gambaran perekonomian daerah Ciayumajakuning dalam lima tahun terakhir dan bagaimana gambaran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Ciayumajakuning.

Bab IV STRATEGI TPID DAN DAMPAK PENGENDALIAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA CIREBON berisi tentang jawaban dari rumusan masalah nomor 3 dan 4 yakni, bagaimana Upaya pengendalian inflasi dan bagaimana dampak pengendalian inflasi terhadap perekonomian daerah Ciayumajakuning.

Bab V PENUTUP terdiri dari kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.